PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESa)

(STUDI KASUS DI DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IMAMUDDIN

NIM E84211064

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IMAMUDDIN

E84211064

Ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2018

Pembimbing,

Laili Bariroh, M.Si

Nip. 197711032009122002

PENGESAHAAN SKRIPSI

Skripsi oleh Moh. Imamuddin ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Plt. Dekan,

Dr. Suhermanto, M.Hum
NIP. 196708201995031001

Tim Penguji :

Ketua,

Laili Buriroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 1969090719940332001

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Moh. Imamuddin

NIM : E84211064

Jurusan : Prodi Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
70834ADF877366878
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Imamuddin

NIM : E84211064

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Imamuddin
NIM : E89211069
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat politik Islam
E-mail address : diyn.imam96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
(Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Moh. Imamuddin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini membahas tentang Bagaimana implementasi program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman.Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman implementasi program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan. Metode ini disebut juga sebagai metode interpretive, karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Teori yang dipakai menjelaskan tentang kebijakan publik dan konsep good and partisipasi politik. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolahan sumberdaya publik. Sedangkan partisipasi politik adalah merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiata-kegiatan politik baik bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan massyarakat, Dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah : kebutuhan masyarakat. syarat mudah. bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar.. Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Mengurangi pangangguran warga meskipun kecil. Opsi pekerjaan sampingan. Perawatan mudah. Pemasaran mudah. Lahan tidak perlu luas. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, antara lain : Aspek modal yang kurang, Sehingga terjadi pembatasan peminjaman jika ada masyarakat yang meminjam modal yang banyak. Pedagang kurang tertata dalam pengelompokan barang dagangan. Ada pedagang yang kurang tertib karena masih berdagang di pintu masuk. Kurangnya kesadaran dari pedagang. Tempat parkir yang kurang lebar, sehinggaa mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar. Belum ada pintu masuk dan pintu keluar. Cuaca panas. Butuh air banyak ketika musim panas datang. Pakan lele mahal.

Kata Kunci : ***Partisipasi, masyarakat, Pengelolaan, BUMDesa,***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Konseptual 6
F. Kajian Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 13
   1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 13
   2. Lokasi dan Waktu Penelitian 15
   3. Pemilihan Subyek Penelitian 16
   4. Tahap-Tahap Penelitian 17
   5. Teknik Pengumpulan Data 18
   6. Teknik Analisa Data 21
   7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Publik 27
B. Konsep Dasar dan Teori Partisipasi 37

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 45
   a. Deskripsi Desa Payaman 45
   b. Kondisi Perekonomian Masyarakat 48
   c. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 50
   d. Kondisi Keagamaan Masyarakat 51
   e. Kondisi Sosial Politik di Desa Payaman 53
B. Profil dan Perkembangan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman 55
   a. Kondisi Desa Sebelum Munculnya BUMDes 55
   b. Sejarah Munculnya BUMDES Mitra Sejahtera 56
   c. Stuktur organisasi BUMDesMitra Sejahtera Desa Payaman 59
   d. Program BUMDes 61

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Implementasi Program BUMDesa 65
B. Keterlibatan Masyarakat Dalam Implementasi Program BUMDesa 89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).[1]

Pendirian BUMDesa dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Potensi yang dimiliki BUMDesa sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.[2]

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3.

[2] Zulkarnain Ridlwan, "*Payung Hukum Pembentukan BUMDesa*," Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3(September-Desember, 2013), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Payamaan resmi terbentuk pada tanggal 17 Desember 2015 diinisiatori oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh Masyarakat Desa Payaman bekerja sama dengan Pemerintah Desa Payaman kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera atau "BUMDesa MITRA SEJAHTERA" yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program usaha yang di kelola BUMDesa "MITRA SEJAHTERA" telah menjalankan beberapa unit usaha untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya di kelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDesa untuk mengelola dan menjalankannya.

Sebelum adanya BUMDesa "MITRA SEJAHTERA" di Desa Payaman ada program yang belum terkelola dengan baik yaitu program pengambilan sampah, yang dulunya dalam pelayanan kebersihan ini petugas pengangkut sampah tidak berjalan dengan rutin dan terkesan seenaknya sendiri, pengambilan sampah yang seharusnya dilakukan 1 minggu 3 kali terkadang baru dilakukan 1 bulan 1 kali dan itu menjadi keluhan masyarakat yang mengikuti program tersebut, karena sampah di tong sampah yang sudah disediakan oleh BUMDesa itu menumpuk dan menimbulkan bau yang kurang enak dan sampai menimbulkan tumbuhnya belatung sehingga sangat mengganggu masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Byen nemen mas buwake sampah kadang sak ulan lagek di jupuk nang tong sampah karo petugase, ambune sampek basin mego ono sete, tonggo-tonggo yo podo gremeng mego ambune mbasini tonggo, nha pye wong petugas wes di bayar nha pelayanane ora sesuai perjanjia, tapi saiki wes berjalan lancar mas".*[3]

Namun setelah adanya BUMDesa MITRA SEJAHTERA dan program tersebut di ambil alih, pelayananya jadi lebih baik dan sudah berjalan teratur sesuai dengan kesepakatan pengambilan sampah yaitu 1 minggu 3 kali pengambilan dan pembuangan ke TPS yang berada di ujung utara Desa.

Adanya program lain juga bisa dirasakan warga desa payaman, misalnya dalam program pengelolaan pasar yang sekarang sudah mulai tertata dengan baik meskipun belum sempurna.

> *"saiki wes enak mas nek mblonjo mego wes ditoto, seng dodol iwak awor kabeh, seng dodol sandangan awor kabeh, seng dodol panganan sak golongan kabeh, ora jeke byen seng morat maret".*[4]

Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDesa ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh.

Dari latar belakang ini maka menarik untuk di teliti tentang Bagaimana implementasi program BUMDesa di Desa Payaman dan juga Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa. Serta, di tulis dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Partisipasi Masyarakat

---

[3] Sukimin, *Wawancara*, Payaman, 24 Juni 2018.
[4] Arofah, Wawancara, Payaman, 26 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pengelolaan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan".

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program BUMDesa dan factor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDesa dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti akan menemuka tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program BUMDesa dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDesa dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman?
2. Untuk mengetahui Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasisiwa, peneliti, hingga masyarakat secara umum sebagai khazanah keilmuan khususnya terkait tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa.
2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada lembaga yang di teliti, melainkan juga memberikan manfaat positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun pemerintah Desa Payaman agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat desa Payaman.

E. Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan definisi yang didasarkan atau sifat-sifat atau hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau dapat di observasikan dan diteliti. Konsep ini sangat penting karena hal yang diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang di lakukan oleh penulis terbukauntuk di uji lagi oleh orang lain.[5]

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam judul proposal ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang berbagai istilah

[5] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam judul proposal ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan ialah:

1. **Partisipasi**

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.[6]

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.[7]

---

[6] Suharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), 102-103.
[7] Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.[8]

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola,[9] berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

[8] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), 115-118
[9] Peter Salim, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[10]

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.[11]

4. BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.[12]

---

[10] Ibid.. 534

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 1-2

[12] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMDesa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan menurut Badriyadi mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan.[13]

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasul dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Yeni Fajarsari pada tahun 2016 yang berjudul *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*.[14] Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDesa secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan berjalanya program-program BUMDesa secara baik. Meski

[13] Badriyadi, Jurnal. *Pengelolaan Dana Pinjaman di Desa Sungai Raya. (*Pontianak. 2012), 8.
[14] Yeni Fajarsari, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*, Skripsi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDesa belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

2. Hasil penelitian yang ditulis Rufaidah ‘aslamiah pada tahun 2017 yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*.[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDesa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDesa dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat. Pengelola unit - unit usaha dibawah BUMDesa merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk

[15]Rufaidah Aslamiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memecahkan masalah penelitiandengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

3. Hasil penelitian yang ditulis Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja pada tahun 2017 yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*.[16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejarakan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan; (2) BUMDesa Desa Pejarakan berperan dalam meningkatnya Pendapatan Asli Desa sehingga nantinya Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian Desa; dan 3) strategi yang dijalankan Pemerintah Desa lebih kepada saling koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa, BPD dan Pihak Pengelola, serta identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, sistem informasi manajemen aset desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset desa, dan keterlibatan jasa penilai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
4. Hasil penelitian Angger Sekar Manikam. 2010. *Implementsi program Badan Usaha Milik Desa* Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu

[16] Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Meggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara, serta literature dan studi pustaka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa beserta pemerintah desa dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program badan usaha milik desa ini belum berjalan dengan baik. kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program badan usaha milik desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi, serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDesa tersebut.[17]

G. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara ilmiah yang di gunakan untuk mendapatkan data dan tujuan untuk kegunaan tertentu. Bedasarkan cara ilmiah, dan kegunaan.[18] Oleh karena itu metodologi penelitian sangat penting untuk memudahkan dalam proses penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

---

[17] Anggar Sekar Manikum, *Implementsi program Badan Usaha Milik Desa* Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009, (Yogyakarta : 2010)

[18] Sugiono.*metode kuantitatif kualitatif dan R&D, (*bandung:alphabet, 2008*), 2.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.[19] Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi didalamnya.[20]

Kualitatif menurut Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Latar alamiah dengan maksud agar hasilnnya dapat di gunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif yaitu berbagai macam metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen[21].

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat sesuai fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian jenis deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adannya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa

---

[19] Nana Sujana Ibrahim, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 64.
[20] Gempur santoso, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 30.
[21]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut[22].

Dalam hal ini pokok permasalahan di dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program BUMDesa di desa Payaman dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Karakteristik penelitian kualitatif lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.

2. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini sangat penting keberadaannya, karena lokasi menjadi sumber data yang valid, disini penliti mengambil lokasi penelitian di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Saat peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti berkenalan lebih dekat dengan para warga yang ada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Terutama dengan pengurus BUMDesa dan perangkat Desa Payaman. Peneliti menginginkan data- data yang jelas sehingga tidak ada kesalahan dalam penulisan laporan. Peneliti melakukan pengamatan atau penelitian di dalam masyarakat dimulai bulan April hingga bulan Juni tahun 2018. Setelah dilakukannya penelitian selama dua bulan tersebut, maka peneliti memulai melakukan penulisan laporan skripsi.

---

[22]Basrowi, Shodikin, *MetodePenelitian Kualitatif Perspektif Mikro*(Surabaya : Insancendikia,2002) ,1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, dengan kata lain subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.[23] Dalam hal ini penulis memilih subjek penelitian ialah seseorang yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan program kerja BUMDesa Mitra Sejahtera .

Sebagai usaha untuk mendapatkan kevalidan data dalam penelitian ini digunakan sumber data. Sumber data ini berasal dari perangkat Desa, masyarakat, dan pengurus BUMDesa di desa Payaman yang diharapan dapat memberikan keterangan mengenai kajian penelitian ini. Di bawah ini nama-nama informan yang peneliti tetapkan sebagai narasumber untuk menggali data-data yang diperlukan peneliti mengenai permasalahan yang diangkat, nama-nama tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar informan yang menjadi Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Status di Desa Payaman
1.	Chalimin	52	Kepala Desa
2.	Ali Faizin	38	Ketua BUMDesa
3.	Kasiyatun	29	Bendahara BUMDesa
4.	Abdul Hakim	36	Kepala Unit Pasar Desa
5.	Sholik	47	Kepala Unit parkir pasar

[23] Tatang, M. Amirin, *Menyusun Perencanaan Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	H. Rusdiyanto	33	Kepala unit pengambilan sampah
7.	Husnun Ni'am	29	Kepala unit kebutuhan pemakaman
8.	Abd.Kholiq	40	Kepala unit budidaya lele
9.	Darmaji	30	Masyarakat, program budidaya lele
10.	Zumaro	34	Masyarakat, program simpan pinjam
11.	Shodiqin	47	Masyarakat, program simpan pinjam
12.	Maisyaroh	30	Masyarakat, program parkir pasar
13.	Anwar	47	Masyarakat, program parkir pasar
14.	Arofah	30	Masyarakat, program pengelolaan pasar
15.	Mas'ula	37	Masyarakat, program pengelolaan pasar
16.	Mufidatin	30	Masyarakat, program pengambilan sampah
17.	Sukimin	56	Masyarakat, program pengambilan sampah
18.	Umar	50	Masyarakat, program keb. pemakaman
19.	Tartib	63	Masayarakat Solokuro

4. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini peneliti membuat proposal penelitian, menemukan informasi, mengurus perizinan, mengumpulkan data dan keperluan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan yang diperlukan sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian disini sebagai penentu hal- hal yang berkaitan dengan persiapan sebelum memasuki lokasi penelitian dan juga peneliti sudah membaca mengenai masalah yang menarik untuk diteliti, serta peneliti memberikan pemahaman sederhana bahwa masalah itu layak untuk diteliti. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini ialah tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mulai masuk pada proses penelitian serta mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, yakni peneliti mempersiapkan proses perizinan. Kemudian, setelah itu barulah peneliti berperan untuk melakukan pencarian data yang sesuai dengan fokus penelitiannya.

c. Tahap Mengolah Data

Pada tahap ini, peneliti memperoleh data sebanyak-banyaknya sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, dilakukan proses pemilihan data yang sesuai dengan rumusan penelitian yang diinginkan. Kemudian, setelah data terkumpul peneliti membandingkan dan melakukan analisis data yang terkumpul dengan teori yang digunakan oleh peneliti serta menyimpulkan penelitian yang dilakukan itu.

d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Pada tahap terkahir ini ialah penyusunan laporan penelitian, penelitian mengkomunikasikan masalah yang diteliti, hal ini ialah untuk mendukung keabsahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.[24] Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan.

Maksud dari observasi dengan partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan merupakan bagian kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.[25] Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan. Dalam hal ini peneliti telah mengamati tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Payaman.

b. Interview

Interview adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.[26]

Peneliti dalam melaksanakan wawancara akan menyampaikan pertanyaan yang sifatnya mengarah dengan judul penelitian, pertanyaan cenderung diarahkan pada usaha untuk menggali secara mendalam dan meluas data atau

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research ll*, (yogjakarta: Andi Offset, 2004), 136.
[25] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 107-108.
[26] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang diperlukan. Setelah mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan maka tidak lupa peneliti akan mencatat jawaban dari subyek.

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Wawancara mendalam (in–depth interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[27] Dokumentasi merupakan pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data- data tertulis lainnya. Peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian itu berlangsung untuk memberikan bukti secara riil sebagaimana kondisi dilapangan terkait permasalahan yang ada dalam masyarakat. Arsip- arsip dan data- data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi atau interview.

[27] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti memperoleh data-data atau dokumentasi dari perangkat Desa dan ketua BUMDesa Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data atau dokumentasi yang diperoleh peneliti ini berupa data-data yang menyangkut kondisi geografis dan monografi desa, data mengenai luas wilayah dan jenisnya, jumlah penduduk, data mengenai mata pencaharian warga dan jumlahnya, jenis agama, data mengenai pendidikan masyarakat dan data yang menjelaskan mengenai potensi yang dimiliki oleh Desa.

6. Teknik Analisis data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan- bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah oleh diri sendiri maupun orang lain[28].

Dalam penelitian ini , proses yang dilakukan peneliti adalah mencari data yang sebanyak mungkin mulai dari pengumpulan informasi- informasi dan memasukkanya ke dalam bentuk catatan kemudian peneliti memasukkan catatan tersebut ke dalam bentuk data. Kemudian peneliti melakukan pemilihan data-data yang tidak begitu penting dalam penilaian. Langkah selanjutnya peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data- data yang telah dipilih dan siap untuk diolah dan disajikan dalam peneliti.

[28]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung : Alfabeta, 2005), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisis data, menurut Sugiono adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, pola, dan suatu uraian dasar[29].

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ada dua tahapan yakni: ketika peneliti masih dilapangan dan yang kedua setelah meninggalkan lapangan. Prosedur analisis data selama dilapangan yang disarankan oleh milles dan Huberman ialah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Atau singkatnya, data yang nantinya didapatkan dari lapangan begitu banyak, maka perlu adanya proses analisis dan pengurangan data yang tidak ada hubungannya dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan agar lebih terfokuskan dengan apa yang ingin diteliti.

Penyajian data ialah setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

[29]Ibid, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman proses ini merupakan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.[30]

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan saat penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data saat penelitian dilakukan dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian serta pengelompokan data yang lebih terfokuskan. Sedangkan analisis data setelah peneletian dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dideskripsikan dan direlevansikan dengan teori yang ada.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data". Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *Persistent Observation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi).[31]

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri. Adapun langkah oprasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

---

[30] Mattew B. Milles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), 21.

[31] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau penulisan terdiri dari empat bab, yang rincianya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan. Serta pada bab ini juga berisi pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, obyek penelitiann, jenis dan sumber data, tahap- tahap penelitian, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data dan teknik pemeriksaan dan keabsahan data.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada Bab ini membahas teori-teori apa saja yang mendukung permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti dapatkan dari beberapa referensi yang mendukung penelitian ini. Setelah peneliti mencari teori-teori yang berkaitan, peneliti membuat kerangka teoritis untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Pada bab ini merupakan bagian terpenting karena memuat penyajian dan analisis data yang di peroleh dari tahapan- tahapan, baik yang sudah di jelaskan pada bab I, dan II. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran pembahasan yang akan dijadikan penelitian, serta menerangkan hasil temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori yang ada. Peneliti disini mengelola data-data dari bab sebelumnya secara spesifik.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan persiapan-persipan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. Lalu akan ada hasil analisis data yang telah di peroleh peneliti yang selanjutnya hasil analisis data tersebut akan dibahas dalam pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Sedangkan untuk BAB V ini berisi kesimpulan apa saja yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian ini yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diberikan saran-saran yang berguna untuk kepentingan praktis maupun kepentingan ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolahan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolahan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.[32]

Banyak sekali definisi mengenai kebijakn publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik baik kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye (1992), "public policy is whatever governments choose to do or not to do" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).[33]Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

---

[32] Edi Suharto, *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta 2008), 3.

[33] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu James Anderson (1970) "*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*" (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).[34] Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large"* (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).[35]

Sedangkan menurut David Easton, "*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole nsociety*" (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).[36] Serta William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektifyang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.[37] Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah:

---

[34] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 35.
[35] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 5.
[36] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 36.
[37] William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik),* terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
d. bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Amara Raksasataya mengemukakan bahwa "kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:[38]

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;

[38] Hessel Nogi S. Tangkilisan,*Evaluasi Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.[39]

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilainilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai "*authorities in apolitical system*" yaitu penguasa dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

[39] Anggara,*Kebijakan Publik,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

a. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
b. kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.
c. kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:[40]

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang

[40] William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.[41]

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horm mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.[42]

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku

---

[41] Riant Nugroho, *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manejemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 618.
[42] Budi Winarno, *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.[43]

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan

[43] Solichin Abdul Wahab, *PengantarAnalisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008) , 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

B. Konsep Dasar dan Teori Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, atau juga pengikutsertaan.[44] Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.[45]

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.[46]

---

[44] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 419.
[45] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010), 46
[46] Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk-bentuk Partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.[47] Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut tabel yang menunjukkan model partisipasi masyarakat menurut para ahli :

Arnstein	**Kenji dan Greenwood**	**VeneKlasen dan Miller**
1. Citizen Control	1. Collective Action	1. Self-Mobilization
2. Delegated Power	2. Co-Learning	2. Interactive Participation
3. Partnership	3. Coopration	3. Functional Participation
4. Placation	4. Consultation	4. Participation For Material Incentives
5. Consultation	5. Compliance	5. Participation By

[47] Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Consultation
6. Informing		6. Passive Participation
7. Therapy		7. Token Participation Or Manipulation
8. Manipulation		

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif.[48] Definisi dari *"partisipasi*" masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik.[49] Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata *"partisipasi"* dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan

[48] Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 106.
[49] Ibid.. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyrakat.[50] Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masayrakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

[50] Sigit Wijaksono, "*Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman",* Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.

e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing, consultation*, dan *placation*, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership, delegated power*, dan *citizen power*.

Menurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* adalah penyampaian informasi (*informing*), konsultasi, dan peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masayrakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.[51]

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi[52], yaitu :

1. *Partisipasi horizontal*, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. *Partisipasi vertikal*, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

---

[51] Sigit Wijaksono, "*Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*", Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

[52] Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 323-324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tangung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.[53]

Rasa tanggung jawab ini memliiki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

[53] Ibid.. 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

a) Deskripsi Desa Payaman

Desa yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Payaman. Desa Payaman adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Solokuro Kabupaten LamonganLuas wilayah pemukiman umum di Desa Payaman adalah 865.134 Ha. Luas pertanian sawah 228.565 Ha, tegal atau ladang 448.384 Ha, pemukiman 71.885 Ha, hutan 116.300 Ha, Ketinggian 36 mdpl, suhu rata-rata 30◦C, jarak dari pusat pemerintahan (kecamatan) 1 km, jarak dari pemeritahan (kabupaten) 36 km.[54]

Tingkat kesuburan tanah merah yang ada di daerah atas lebih subur dari pada yang ada di daerah bawah yang merupakan tanah lempung. Kemiringan desa Payaman daerah atas dan bawah 35 derajat. Sedangkan topografi atau bentahan lahan di Desa Payaman adalah dataran rendah seluas 865.134 Ha dan perbukitan 165.434 Ha.

Desa Payaman terletak berbatasan dengan Desa lain sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kranji Kecamatan Paciran.

[54] Lamongankab.go.id/instansi/solokuro/payaman/ di akses tanggal 31/05/2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendang Agung Kecamatan Paciran.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Godog Kecamatan Laren.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro

Pusat pemerintahan Desa Payaman terletak di Desa Payaman karena kantor Balai Desa dan kantor Kepala Desa berada Di Desa Payaman.

- **Produk Unggulan Desa Payaman**

  a. Pertanian : Dominan jagung, padi, kacang, dll

  b. Perikanan : -

  c. Perkebunan : -

  d. Industri/Industri rumah tangga : Kerajinan Bambu

  e. Perdagangan : -

  f. Pariwisata : -

- **Uraian Produk Unggulan di Payaman meliputi**

  a. Jenis Produk : Reyeng / Tumbu (bahasa payaman)

  b. Nama Produk : -

  c. Volume Produksi : 500.000 biji/bln

  d. Daerah Pemasaran : Rembang, Jepara, Blimbing

  e. Alamat Pemesanan : Desa Payaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR KEPENGURUSAN PEMERINTAHAN DESA PAYAMAN

KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

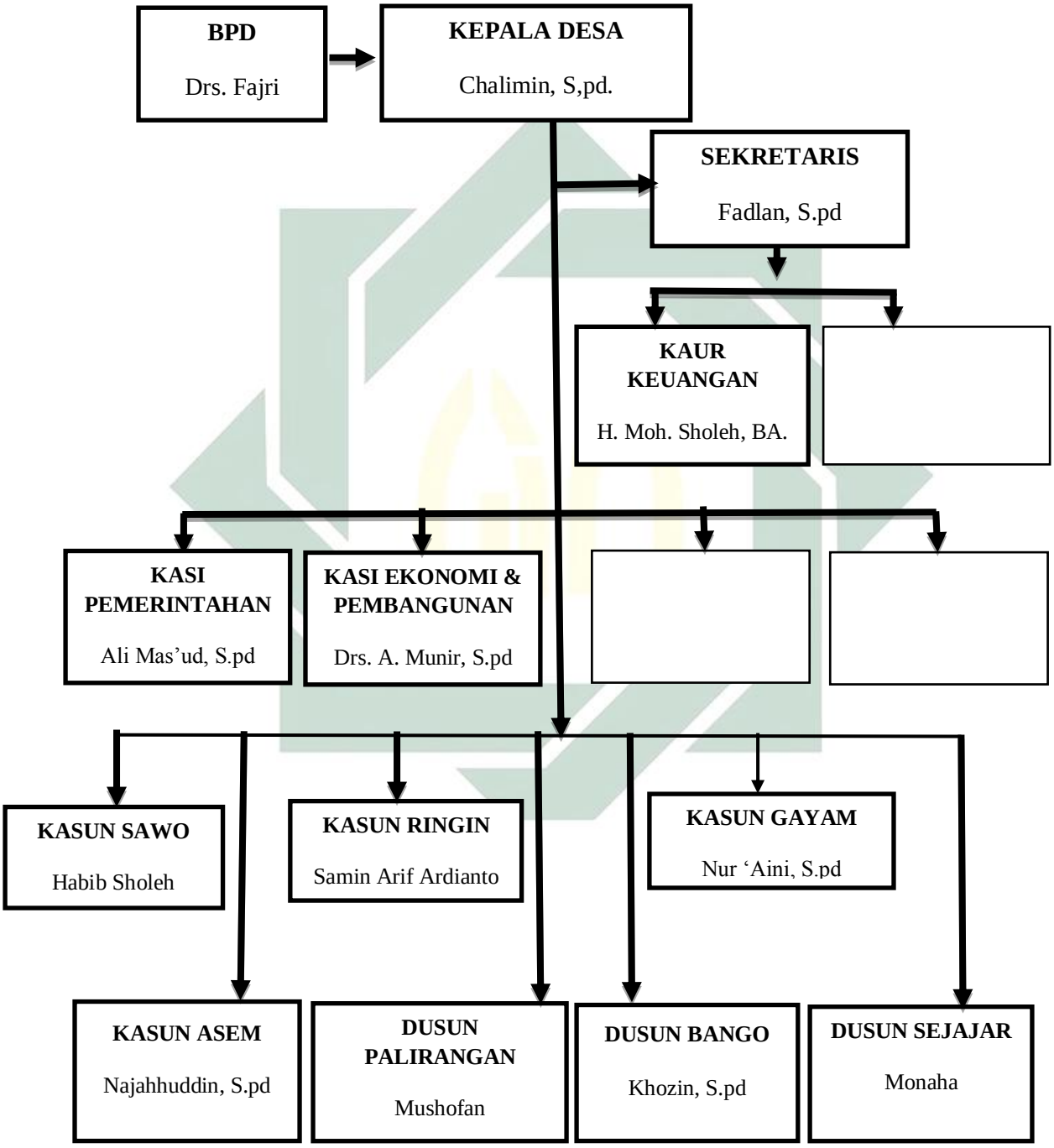

Sumber : pemerintahan Desa Payaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kondisi Perekonomian Masyarakat

Kondisi perekonomian sangat erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia yang ada di bumi. Setiap manusia senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan di bidangnya dengan keahlian yang dimiliki masing – masing manusia, dari jumlah penduduk 12.625 jiwa yang terdiri dari 6.291 laki-laki, dan 6.334 perempuan, 3.097 kepala keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Payaman merupakan masyarakat yang memilki tingkat perekonomian menengah ke bawah.[55]

Hal ini nterlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, dan jagung. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat tabel berikut :[56]

[55] Daftar Isian *Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten* Lamongan Tahun 2016, 13
[56] Ibid.. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 2.1

Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	5.486
2.	Buruh Tani	2.327
3.	Buruh Migran	1.867
4.	Pegawai Negeri Sipil	62
5.	Pengerajin Industri Rumah Tangga	1.625
6.	Pedagang Keliling	7
7.	Peternak	9
8.	Nelayan	3
9.	Montir	-
10.	Dokter Swasta	2
11.	Bidan Swasta	3
12.	Perawat Swasta	7
13.	Pembantu Rumah Tangga	221
14.	TNI	2
16.	POLRI	1
17.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12
18.	Pengusaha Kecil Dan Menengah	155
19.	Pengacara	2
20.	Notaris	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21.	Dukun Kampung Terlatih	4
22.	Jasa Pengobatan Alternatif	20
23.	Dosen Swasta	25
24.	Pengusaha Besar	-
25.	Arsitektur	-
26.	Seniman/Artis	2
27.	Karyawan Perusahaan Swasta	170
28.	Karyawan Perusahaan Pemerintahan	-

c) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Sosial budaya merupakan segala sistem atau tata nilai, pola berfikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Atau segala hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia baik yang menyangkut individu atau kelompok seperti, dalam halnya masyarakat yang timbul dalam berbagai bentuk baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Penduduk Desa Payaman tergolong masih homogen, oleh karena itu mereka masih tampak kekelompokannya, baik dari segi tolong menolong, bantu membantu, saling menghormati, dan lain-lain. Sehingga rasa hormat dan harga diri mereka masih kelihatan, mereka serempak dalam mengerjakan sesuatu secara gotong royong demi kepentingan bersama.

Kerukunan dan kerja sama mereka memang sudah lama ditampakkan, hal ini karena dilatarbelakangi oleh rasa persaudaraan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat sesuai dengan karakter sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh kongkrit, adanya rasa gotong royong dalam pembangunan jalan, pembuatan rumah (gugur gunung), babat kuburan, dan lain-lain. Dari situ nampak dasar sebagai makhluk sosial yang termanifestasi dalam bentuk seperti diatas.

Masyarakat Desa Payaman juga memiliki kebiasaan pada waktu dulu yaitu slametan. Pada hari-hari tertentu, sebagian penduduk masyarakat kecamatan solokuro masih melaksanakan kenduri agar sesuatu yang diinginkan dapat terkabul. Selamatan ini seperti wethonan (selamatan hari lahir), tingkeban, selametan orang yang sudah meninggal dan lain-lain.

Masyarakat desa Payaman adalah masyarakat yang agamis ini ditandai dengan banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri di dalamnya. Dalam satu desa kurang lebih terdapat tiga pondok pesantren, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Yayasan Pondok Pesantren Roudlatul Muta'abidin dan Yayasan Pondok Pesantren Al – Aman. Ada juga langgar – langgar kecil yang biasanya di gunakan untuk mengaji setiap malam harinya.

d) Kondisi Keagamaan Masyarakat

Semua penduduk masyarakat Desa payaman beragama Islam yang berhaluan Ahlusunnah wal jama"ah. Sebagian besar penduduk desa Payaman kecamatan Solokuro sebagai warga Nahdhatul Ulama" (NU) dan sebagian lagi sebagai warga Muhammadiyah. Pelaksanakan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan masyarakat di Desa Payaman sudah berjalan dengan baik, seperti besarnya antusias warga dalam menjalankan program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh penguruspengurus masjid dan musholla.seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, membaca Yasin dan tahlil dan membaca sholawat Nabi (diba‟an).

Dalam melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaa‟ah di masjid dan musholla bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah jama‟ah sholat dari masing-masing tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjalankan doktrin-doktrin agama di Desa Payaman Kecamatan Solokuro tergolong sangat baik.

Adapun kegiatan membaca Yasin dan tahlil adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap kamis malam. Akan tetapi jika ada masyarakat yang meninggal dunia maka kegiatan yasin dan tahlil dilaksanakan dirumah orang yang menninggal dan biasanya bersambung sampai 7 hari setelah meninggal Dunia.

Sedangkan dalam kegiatan membaca sholawat (diba‟an) dilaksanakan setiap minggu malam, dalam kegiatan membaca sholawat diba‟an ini mayoritas anggotanya adalah pemuda-pemuda Desa Payaman. Dalam pelaksanaanya, dhiba‟an dilaksanakan dirumah-rumah secara bergantian

e) Kondisi Sosial Politik di Desa Payaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Payaman, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilbup, pilgub, dan pilpres,) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Payaman berbeda dengan sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut ***pulung*** –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut. Di Desa Payaman tidak memandang garis tangan atau hubungan keluarga dari kepala desa sebelumnya, masyarakat menilai sosok atau figur yang di anggap mampu menjadi pemimpin desa meskipun harus bersaing secara langsung melalui pemilihan yang biasanya di lakukan di lapangan Tlogo Ploso Desa Payaman.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Payaman pada tahun 2011. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada 2 .kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Payaman seperti acara perayaan desa.

Pada tahun Selanjutnya yaitu 2013 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Lamongan secara langsung dan hampir 98% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Payaman. Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Payaman. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

B. Profil dan Perkembangan BUMDesa Mitra Sejahtera Desa Payaman

a. Kondisi Desa Sebelum Munculnya BUMDesa

Dengan berdirinya BUMDesa MITRA SEJAHTERA di Desa Payaman Kecamatan Solokuro dapat dikatakan belum membawa perbedaan ditingkat kesejahteraan masyarakaat Desa Payaman, meskipun belum terlalu besar dan belum semua masyarakat yang merasakan.

Ini sangat mempengaruhi keadaan Desa dan juga perekonomian masayarakat terhadap tingkat kesejahteraan mereka, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.[57] BUMDesa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan masyarakat Desa. artinya usaha yang kelak akan di wujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasraet untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masayrakat Desa. berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya

[57] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan BUMDesa*. (Jakarta:Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007). 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMDesa mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Sejarah Munculnya BUMDESA Mitra Sejahtera

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dilandasi oleh Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi ekonomi di tingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar di Desa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

> *"Menurut Chalimin, " dalam pembentukan BUMDesa Mitra Sejahtera yang menjadi inisiator pendirian BUMDesa adalah Kepala Desa dan juga BPD dari hasil rapat dan juga musyawarah dari pemerintah Desa yang kemudian menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan BUMDesa sebagai perintah dan surat edaran dari kementrian desa tentang undang-undang yang mewajibkan semua desa untuk mendirikan suatu lembaga yang bisa mengelola Aset desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat".*[58]

Berdasarkan peraturan Desa Payaman nomor 03 tahun 2015 pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) MITRA SEJAHTERA terbentuk dengan hasil rapat perencanaan Desa pada tanggal 17 Desember 2015 yang bertempat di Desa Payaman. Namun BUMDESA Mitra Sejahtera baru bisa berjalan aktiv pada akhir tahun 2016 yaitu pada tanggal 20 Desember 2017, "*menurut ketua BUMDESA sendiri alasan baru bisa berjalan 1 tahun setelah pembentukan kepengurusan adalah masalah modal yang belum di dapat dari pemerintah Desa payaman, sehingga kita belum bisa*

[58] Chalimin, *Wawancara*, Payaman, 20 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak untuk melakukan sebuah kegiatan yang seharusnya bisa di lakukan dari awal pembentukan".[59]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Mitra sejahtera) ini berdiri di karenakan pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Payaman. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak potensi desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah desa mendirikan BUMDesa Mitra Sejahtera ini untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di desa.

- VISI DAN MISI BUMDESA MITRA SEJAHTERA DESA PAYAMAN
  a. Visi Badan Usaha Milik Desa "MITRA SEJAHTERA", Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Payaman melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.
  b. Misi Badan Usaha Milik Desa "MITRA SEJAHTERA" :
     1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha bersama serta usaha sector riil.
     2. Pengembangan layanan social melalui system keterjaminan social bagi rumah tangga miskin.

[59] Ali Faizin, *Wawancara*, Payaman, 29 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengembangan insfratruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola dana program yang masuk ke Desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

c. Stuktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Sejahtera Desa Payaman

Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Strukrur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA

Desa Payaman

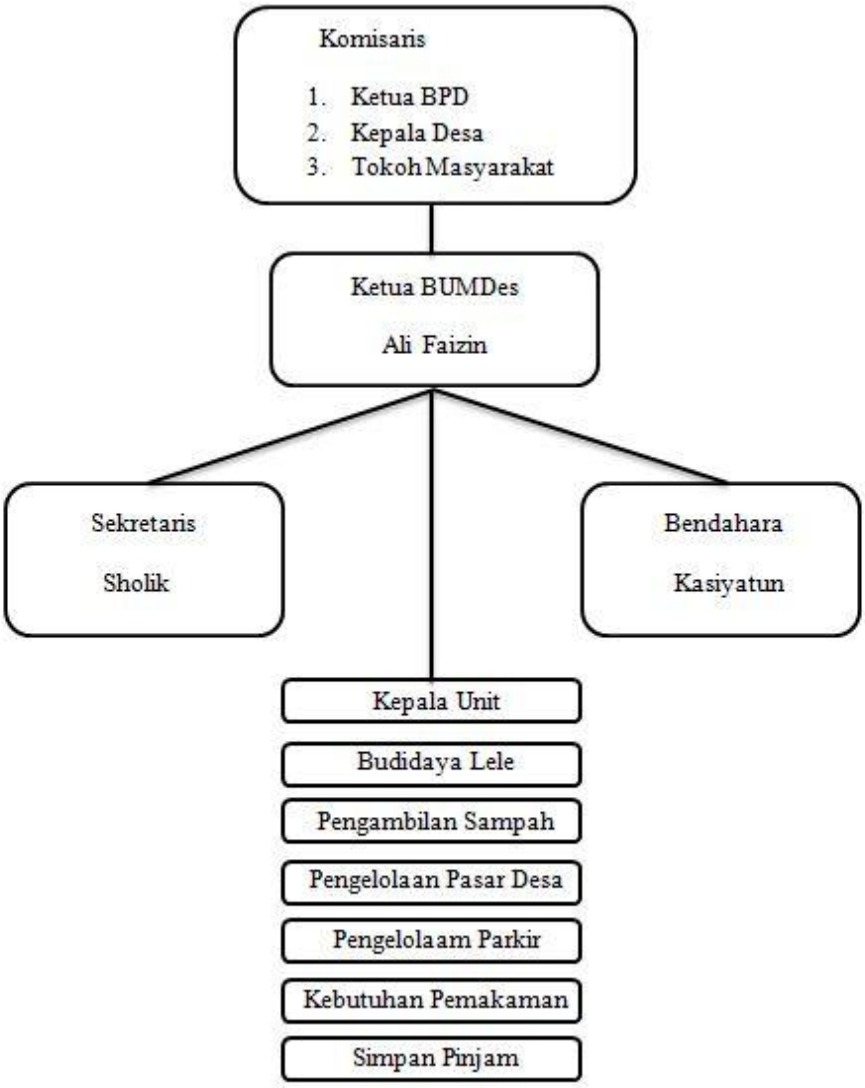

Sumber : BUMDesa Mitra Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Program BUMDesa

BUMDesa MITRA SEJAHTERA mempunyai program yang semua sudah berjalan secara keseluruhan. Namun karena melihat umur BUMDesa yang baru 1 tahun berjalan dan masih dalam proses untuk memperbaiki semua program yang sudah berjalan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat desa, dan juga memperkuat perekonomian Desa Payaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa payaman. Berikut ini adalah program yang di kelola oleh BUMDESA yang sudah berjalan ada 6 program yaitu :

1.) Program simpan pinjam

Melauli program ini BUMDesa memberikan layanan berupa simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung sebagai investasi jangka panjang atau jangka pendek, dan juga menyediakan layanan berupa pinjaman uang bagi para masyarakat yang kurang modal dan ingin memulai sebuah usaha, dengan syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh BUMDesa.

Dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih terbantu dalam bidang usaha yang ingin mereka jalankan, karena lebih mudah untuk mengajukan suatu pinjaman untuk memulai usaha, karena tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Program budidaya lele.

program ini merupakan program yang baru tahap uji coba, karena BUMDesa ingin mengetahui apakah program ini mudah dan bisa di lakukan semua warga Desa Payaman, sehingga BUMDesa baru melakukan budidaya lele ini yang di kelola langsung oleh pengurus internal yang cara pembudidayaannya di lakukan oleh satu orang yang telah di tunjuk oleh BUMDesa melalui kepala Unit program budidaya lele. Program ini baru berjalan 3 bulan dan di kelola 1 orang dan jumlahnya 3 kolam, dengan adanya usaha ini BUMDesa berharap nantinya bisa membantu perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa.

3.) Program pengambilan sampah.

Program ini sangat membantu warga yang tidak mempunyai lahan kosong, dan tidak perlu lagi membuang sendiri ke TPS, karena BUMDesa sudah mempekerjakan petugas kebersihan untuk mengambil sampah warga yang mengikuti program pengambilan sampah.

Dengan adanya program ini BUMDesa berharap masyarakat bisa terbantu dalam menangani masalah sampah, karena BUMDesa telah menyediakan tong sampah yang bisa di jadikan tempat sampah bagi masyarakat yang mengikuti program ini, kemudian nanti ada petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah di tong sampah warga, yang di lakukan pengambilan 1 minggu 2 kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.) Program pengelolaan pasar desa.

Program sudah ada sejak lama, namun dulu yang mengelola langsung dari desa sebelum terbentuknya BUMDesa mitra sejahtera, dulu pasar masih belum tertata dengan baik, sekarang pasar menjadi lebih tertata setelah di kelola oleh BUMDesa, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada sedikit permasalahan yang harus segera di selesaikan, misalnya masih ada pedagang yang berjualan di pintu masuk pasar, itu mngakibatkan pintu masuk semakin sempit karena terisi oleh pedagang yang tidak sadar akan ketertiban.

5.) Program pengelolaan parkir pasar.

Program ini juga sudah ada sejak lama yang telah di kelola oleh desa, namun setelah BUMDesa terbentuk sekarang di kelola oleh BUMDesa. Masyarakat berharap parkir pasar bisa berubah karena belum ada perubahan yang signifikan dari dulu, untuk tempat juga tidak bisa berubah karena lokasi pasar yang sudah tidak bisa berubah, dan di sekitar pasar tidak ada l;lahan kosong yang bisa di jadikan tempat parkir, sehingg satu-satunya tempat ya memakai setengah jalan raya.

Parkir ini merupakan penyubang retribusi terbesar di banding dengan program yang lain. Sehingga kalau bisa mengatur lebih baik lagi darisegi pengelolaan, maka hasil yang di dapat akan lebih besar lagi.

6.) Program kebutuhan pemakaman.

Program merupakan program yang dimana BUMDesa menyediakan batu kapur sebagai penutup jenazah di dalam tanah, dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu nisan sebagai identitas nama agar keluarga tidak kebingungan dalam mencari keluarganya ketika ziarah kubur.

Dengan adanya program ini masyarakat tidak kesulitan agi dalam memenuhi kebutuhan pemakamannya, karena sudah di sediakan BUMDesa, masyarakat tinggal menghitung jumlah batu yang di pakai dalam setiap proses pemakaman dan melakukan pembayaran di kantor BUMDesa yang bertempat di pasar lantai dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 sampai 29 Juni 2018 menghasilkan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai optimalisasi BUMDesa di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.

A. Impelementasi program BUMDesa Minta sejahtera di Desa Payaman.

Banyak kebijakan pemerintah berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Lembaga ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. di tengah-tengah persaingan global yang kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Desa. salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negri Adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak perekonomian desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMDesa sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha Desa, meliputi usaha sector moneter (keuangan) dan sector riil. Disahkanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat Desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan Desa melalui undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.

BUMDesa "MITRA SEJAHTERA" yang dimiliki oleh Desa Payaman sudah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan juga kegiatan yang dilakukan demi memperkenalkan kepada warga masyarakat, bahwasannya Desa Payaman sudah mempunyai sebuah tempat untuk membantu warganya dalam memajukan perekonomian desa dan juga mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD.

Dari pelaksanaan peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDesa untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam setiap program yang di pilih dan yang sudah berjalan BUMDesa selalu melakukan analisis terlebih dahulu berdasarkan kebutuhaan masyarakat, apa yang di rasa dan masukan dari masyarakat menjadi sarana program yang terbaik bagi masyarakat desa payaman. Dengan begitu setiap program yang berjalan masyarakat menjadi antusias karena masyarakat merasa dilibatkan secara langsung untuk menjadi bagian dari BUMDesa. Namun tidak semua program masyarakat harus di libatkan secara langsung, karena ada juga program yang dibuat oleh BUMDesa dengan cara rapat internal pengurus BUMDesa saja.

a. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam kebutuhan pemakaman

Peran BUMDESA dalam program kebutuhan pemakaman ini adalah menyediakan batu kapur dan juga batu nisan, program kebutuhan pemakaman yang dikelola BUMDESA ini adalah jenis program yang di mana masyarakat di haruskan mengikuti program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ketika ada salah satu keluarganya yang mengalami musibah meninggal dunia. Karena agar mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemakaman.

> *"Dari pada kita cari sendiri kebutuhan pemakaman berupa batu kapur dan batu nisan mending langsung laporan ke pak Ni'am saja lebih simple dan tidak usah mencari lagi, tinggal penyelesaian pembayaran batu kapur dan batu nisan yang di pakai tersebut di kantor BUMDesa mas".*[60]

Syarat dalam pengurusan kebutuhan pemakaman menurut Husnun Ni'am "jika ada keluarga yang meninggal adalah dengan mendatangi kantor BUMDesa yang ada di pasar desa lantai dua untuk mengurus semua total biaya yang sudah menjadi tanggungan bagi keluarga yang meninggal dunia.

> *Setiap satu batu kapur berharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batu nisannya berharga RP. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh ribu rupiah untuk Dewas Sedangkan Untuk anak-anak RP. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)".*[61]

BUMDESA Mitra Sejahtera hanya menyediakan Batu Nisan dan batu kapur karena urusan tanah sudah menjadi hak masyarakat desa karena sudah tidak ada urusan lagi dengan pemerintah Desa maupun BUMDesa, itu sudah merupakan fasilitas semua masyarakat Desa bagi penduduk Desa Payaman yang meninggal Dunia.

> *'Nek nang Solokuro iki mas nek butuh watu karo petek (batu nisan) yo lewat sinoman (penggali kubur) mas, ora lewat deso langsung, dadi nguruse yo langsung nang sinoman nek butuh gawe ngubur sanak dulur seng mati."*[62]

---

[60] Umar, *Wawancara*, Payaman, 24 Juni 2018.
[61] Husnun Ni'am, *Wawancara*, Payaman, 17 juni 2018.
[62] Tartib, *Wawancara* , Solokuro, 24 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan yang ada tetangga desa yaitu desa Solokuro yang kebutuhan pemakaman semua di serahkan kepada (sinoman) penggali kuburnya tidak melalui desa maupun lembaga desa, sehingga ketika mendapat keuntungan uangnya tidak masuk ke desa melainkan buat mereka sendiri.

Berbeda dengan yang di kelola oleh BUMDesa yang bisa mengatur keuangan sehingga ketika mendapat keuntungan maka, semua uang hasil dari kebutuhan pemakaman masuk ke desa.

b. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam simpan pinjam

Program simpan pinjam ini adalah program yang membutuhkan modal banyak, karena menyediakan modal bagi masyarakat yang membutuhakan dana untuk keperluan usaha ataupun yang lainnya. Namun dalam hal permodalan BUMDESA hanya di modali 50 juta dari pemerintah desa, sehingga dengan modal yang minim, BUMDESA harus bisa memanfaatkan modal awal tersebut untuk mencukupi kebutuhan para anggota simpan pinjam.

Peran BUMDesa dalam program simpan pinjam adalah melayani dan memberikan pinjaman modal dan juga menerima simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung. Dalam proses simpan pinjam ini, ketika ada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman maupun simpanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk anggota BUMDesa sama halnya dengan koperasi pada umumnya, yaitu di batasi 50 anggota, dan itu sudah terpenuhi jumlanya. Sedangkan untuk nasabah jumlahnya baru 20 anggota.

> *Syarat dalam pengajuan pinjaman menurut Kasiyatun adalah "harus dengan cara mengisi formulir pendaftaran sebagai surat permohonan dan juga surat perjanjian agar memahami aturan yang di terapkan oleh BUMDesa di program simpan pinjam. Dan harus membawa surat kendaaran bermotor berupa BPKB kendaraan, karena BUMDesa lebih mengutamakan surat kendaraan bermotor. Sedangkan khusus untuk pedagang di pasar yang sudah memiliki surat hak pakai boleh di jadikan jaminan sebagai pengajuan peminjaman".* [63]

Sedangkan dalam proses simpanan BUMDesa syaratnya hanya mendaftar sebagai nasabah dan menyetorkan uang RP. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk membuka buku tabungan atau biaya administrasi. Perbedaan dengan koperasi lain yang ada di desa adalah pada bunga simpanan yaitu 1 % untuk tiap bulanya baik yang jadi anggota maupun nasabah, sedangkan untuk bunga pinjaman untuk anggota ada perbedaan jika anggota bulanan sebesar 1,5% sedangkan anggota musiman sebesar 2%. Untuk nasabah bulanan bunganya 2% sedangkan untuk nasabah yang musiman sebesar 2,5%.[64]

> *"Dengan adanya BUMDesa ini sekarang saya tidak pernah pinjam ke koperasi lain atau ke bank karena disini lebih cepat dan tidak ribet mas pengurusanya. Namun di BUMDesa kadang peminjaman tidak bisa banyak karena di batasi maksimal 5 juta rupiah karena ketersediaan dana yang*

[63] Ali Faizin, *Wawancara*, Payaman, 29 Juni 2018.
[64] Kasiyatun, *Wawancara*, Payaman, 30 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas. Dan terkadang barang yang saya jaminkan berupa BPKB di nilai rendah tidak sesuai yang saya harapkan.''[65]

Dengan adanya program ini masyarakat sudah ada yang memanfaatkan untuk melakukan pinjaman sebagai modal usaha yang akan mereka jalankan, namun ada juga masyarakat yang belum memanfatkan program ini dan merasa program simpan pinjam ini sama dengan simpan pinjam yang ada di koperasi dan bank yang lain.

Menurutku yo Podo ae mas, simpan pinjam seng nang BUMDesa karo nang koperasi liane utowo bank. Nang BUMDesa malah nyelangi mek iso titik mgo modale BUMDesa yo minim, tapi y enae mgo iki usahane Deso dadi kabeh batine kan yo kanggo deso.[66]

c. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam pengelolaan pasar Desa

Program pasar desa yang ada di desa payaman adalah salah satu unit usaha yang di kelola oleh BUMDESA Mitra sejahtera. Pasar desa ini telah ada sejak lama yang dulu di pegang oleh desa, namun sekarang di kelola oleh BUMDesa. adanya pasar desa karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih mempermudah berbelanja kebutuhan pokok setiap harinya, dan juga bagi sebagian masyarakat yang ingin menjual hasil kebunya seperti pisang, singkong atau (mennyok) ke pasar yang lebih dekat,maka pemerintah Desa membangun pasar desa untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli.

---

[65] Zumaro, *Wawancara*, payaman, 28 juni 2018.
[66] Shodiqin, *Wawancara*, Payaman, 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam program ini BUMDesa berperan untuk mengelola agar pasar desa bisa menjadi lebih baik dan dapat di manfaatkan secara maksimal bagi seluruh masyarakat desa. dengan adanya pasar desa ini agar masyarakat desa payaman merasa terbantu baik yang menjadi pedagang maupun yang mau mencari barang yang di butuhkan, ini merupakan akses masyarakat agar mempermudah dalam memenuhi stiap kebutuhan yang diinginkan".[67]

Adanya pasar desa juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui berbagai kebijakan yang di lakukan pemerintah Desa. diantaranya meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian, demi menjaga kebutuhan keberlangsungan stock kepasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal.

"saiki wes enak mas nek mblonjo mego wes ditoto, seng dodol iwak awor kabeh, seng dodol sandangan awor kabeh, seng dodol panganan sak golongan kabeh, ora jeke byen seng morat maret".[68]

Pasar desa payaman ini merupakan pasar terbesar di wilayah kecamatan solokuro. Pasar payaman juga beroperasi setiap hari dan para pedagang mulai berjualan ada yang dari jam 6 sudah menjual barang dagangannya di depan paasar. Ada yang jam 8 baru buka toko.

"Saiki luweh gampang nek golek opo-opo nang pasar wes ono kabeh, ra perlu adoh-adoh golek nang njobo deso".[69]

---

[67] Abdul Hakim, *Wawancara*, Payaman, 25 mei 2018.
[68] Arofah, Wawancara, Payaman, 26 Mei 2018.
[69] Mas'ula, *Wawancara*, Payaman, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak penduduk luar desa payaman yang tiap hari berbelanja di sini. Karena itu pasar merupakan salah satu penyetor dana retribusi terbanyak setelah parkir pasar.

> *"Pendapatan yang di dapat dalam setiap bulanya mencapai rata-rata perbulannya Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), untuk tiap harinya penghasilan dari pasar desa ini paling ramai adalah pas hari pasaran jawa yaitu (Wage dan Legi) dan ketika mendekati ramadhan dan hari raya".*[70]

Dalam hal ini BUMDesa melakukan penarikan pajak (tarik sapon) kepada semua pedagang yang berjualan di pasar desa payaman, baik yang sudah punya lapak tetap di dalam pasar maupun yang yang berjualan di depan pasar yang tidak mempunyai lapak tetap, dengan pembayaran setiap harinya Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebagai dana pengelolaan yang meliputi kebersihan.

> *"Semua penghasilan yang di dapat dari keuntungan program pasar desa yang di kelola oleh BUMDesa Mitra Sejahtera ini 100 % masuk ke pemerintah desa payaman".*[71]

d. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam pengelolaan parkir pasar

Program parkir pasar ini adalah program satu paket dengan pengelolaan pasar desa, dimana parkir di sediakan untuk para pedagang dan pembeli yang melakukan aktivitas di pasar, demi terciptanya keadaan yang kondusif dan kenyamanan para pemilik kendaraan bermotor.

> *"Demi kenyamanan dan keamanan kendaraan dari pada di parkir sembarangan. Resiko kehilangan mas. Kan wes tau ono*

[70] Abdul Hakim, *Wawancara*, Payaman, 12 Mei 2018.
[71] Ali Faizin, *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus byen speda di deleh ngawur gak di parkir trus di colong wong, dari pada ono kasus iku maneh mending di parkirno mas aman".[72]

Parkir pasar ini berada di sekeliling pasar yang bertempat di jalan raya karena memang lokasi pasar yang berada di tengah desa dan tepat di belakang Masjid Besar Baitur Ar-Rohman Desa Payaman. Dalam penataanya parkir sendiri, para petugas parkir (Jukir) haruss bisa menata parkir kendaraan bermotor dengan rapi, agar tidak mengganggu pengguna jalan yang ingin masuk ke pasar. Biasanya setengah dari jalan raya di gunakan untuk parkir pasar, karena lahan parkir memang sudah tidak bisa berpindah di lain tempat, di sekitar pasar juga sudah tidak ada lahan kosong, semua sudah berisi rumah masyarakat desa Payaman.

"Parkir pasar iki wes ra iso di gedekno raiso di cilikno mas, kate pye lawong pasare pas nang tengah deso, kiwo tengen wes omah tok, parkir nang dalan iki ae nek wayae dino pasaran wong liwat sampek macet polae dalane gawe panggon sepeda mas"[73].

BUMDesa mengatur biaya setiap kendaraan bermotor yang parkir dengan harga setiap sepeda motor RP. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) bagi pengunjung atau pembeli, sedangkan untuk pedagang, BUMDesa memberikan keringanan dengan memberikan layanan parkir berlangganan yaitu setiap satu hari RP. 1.000 (Seribu Rupiah), itu bisa di bayarkan setiap hari ataupun setiap

[72] Maisyaroh, *Wawancara*, Payaman 27 Mei 2018.
[73] Anwar, *Wawancara*, Payaman, 10 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan satu kali. Sedangkan untuk kendaran Mobil biaya parkir RP. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan kadang ada Truck pengangkut Barang di tarik biaya RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

> *"Parkir iki bendino rame, tapi paling rame yho dino pasaran legi kro wage mas, opo meneh nek kate poso utowo kate riyoyo, seng tukang parkire malah bingung olehe ndeleh sepeda polae saking akehe".*[74]

Parkir ini menjadi penyumbang retribusi terbesar untuk Desa di banding program BUMDESA yang lain, apalagi jika hari-hari pasaran yaitu wage dan Legi maka pengunjung pasar meningkat dari hari biasanya, dan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan parkir pasar tiap harinya.

> *Pemasukan dana retribusi parkir tiap bulannya minimal mendapatkan RP. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah). Sedangkan ketika menjelang bulan puasa dan hari raya satu bulan mendapat hasil RP. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).*[75]

e. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam Pengambilan sampah

Program pengambilan sampah yang di kelola oleh BUMDESA ini di utamakan kepada masyarakat Desa Payaman yang tidak mempunyai lahan kosong untuk tempat pembakaran sendiri baik di depan rumah ataupun di belakang rumah.

> *"Saya memanfaatkanya karena tidak punya lahan untuk membakar/membuang sampah. Dulunya sih suami saya yang buang sampah ke TPS yang ada di setalok itu mas, tapi semenjak suami saya jadi TKI gak ada lagi yang*

[74] Sholik, *Wawancara*, Payaman, 08 Mei 2018.
[75] Kasiyatun, *Wawancara*, Payaman, 29 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuangnya, makanya saya ikut program tong sampah ini mas".[76]

BUMDESA dalam hal ini berperan unuk menyediakan tong sampah untuk tempat sampahnya bagi masyarakat yang sudah mendaftar ikut program pengambilan sampah tersebut, kemudian nanti ada petugas pengangkut sampah yang mengambil saampah yang ada di tong sampah warga kemudian nanti di buang di TPS yang ada di ujung utara desa yang bertempat di *Mbabri'an*.

"masyarakat yang sudah menafaatkan program ini berjumlah kurang lebih 300 KK, sedangkan Masyarakat Desa yang ingin belum mengikuti dan ingin mengikuti program ini tinggal datang ke kantor BUMDESA Mitra Sejahtera dengan membawa Foto copy KK dan juga KTP dan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran pada setiap bulanya sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)".[77]

Keberadaan BUMDesa dalam menaungi unit pengambilan sampah ini diharapkan bisa mengurangi permasalahan tentang sampah yang ada di desa. untuk petugas pengangkut sampah sendiri menurut heru rusdiyanto sebagai kepala unit pengambilan sampah yaitu pihak BUMDesa mengangkat satu orang yang mau menjadi ketua petugas pembuangan sampah karena BUMDesa menggunakan system borongan, setelah itu terserah ketuanya tadi

[76] Mufidatin, *Wawancara*, Payaman, 27 Juni 2018.
[77] Heru Rusdianto, *Wawancara*, Payaman, 13 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kerjakan sendiri atau mengajak orang lain atau mencari orang lagi untuk di ajak bekerja dalam menjalankan tugas kebersihan tersebut, yang sudah terjadi selama ini petugas tidak bekerja sendiri, petugas biasanya paling banyak berjumlah 3 orang.

Pelayanan tentang petugas pengangkut sampah yang ada di desa payaman dulunya di anggap tidak berjalan lancar dan kurang disiplin dalam proses pengambilan dan pembuangan sampah yang dalam kesepakatan awal pengambilan di lakukan dalam waktu satu minggu dua kali namun dalam kenyataannya terkadang pengambilan dan pembuangan sampah yang ada di tong sampah warga baru dilaksanakan pada 3 minggu sekali kadang 1 bulan sekali.

> *"Byen nemen mas buwake sampah kadang sak ulan lagek di jupuk nang tong sampah karo petugase, ambune sampek basin mego ono sete, tonggo-tonggo yo podo gremeng mego ambune mbasini tonggo, nha pye wong petugas wes di bayar nha pelayanane ora sesuai perjanjia, tapi saiki wes berjalan lancar mas".*[78]

Masyarakat banyak yang mengeluh karena petugas pengambil sampah yang tidak konsisten dalam cara bekerjanya, akibatnya sampah menumpuk dalam tong smpah warga dan menimbulkan bau yang sangat mengganggu masyarakat sekitar terkadang juga sampai menimbulkan keluarnya belatung, karena dalam tong sampah tersebut tercampur jadi satu antara sampah

[78] Sukimin, *Wawancara*, Payaman, 24 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basah dan sampah kering tidak ada pemisahan dan juga tidak ada pembagian antara tempat sampah basah dan tempat sampah kering, dan seharusnya ini bisa di bedakan karena sampah masih bisa di olah, baik sampah basah maupun sampah keringnya.

Sehingga dari sampah yang di anggap tidak berguna dan menjijikkan oleh masyarakat dapat memunculkan ide untuk menjadikan sampah tersebut menjadi lebih bermanfaat, misalnya sampah kering bisa di jadikan kerajinan tangan, semisal tas, dan dari sampah bisa di olah menjadi pupuk tanaman atau yang lainya.

f. Implementasi dan Peran BUMDesa dalam budidaya lele

Program budidaya lele ini adalah program uji coba yang baru di terapkan oleh pengurus internal BUMDESA saja, program ini sudah berjalan selama 3 bulan. Untuk budidaya lele ini pihak BUMDESA menggunakan jasa satu orang dari masyarakat untuk membudidayakan lele tersebut.

> *"Nek apik iku kan jelas akeh seng niru to. Nah berhasil itukan harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat itu tidak butuh teori banyak yang penting apa yang di lakukan kelihatan hasil, wong dengan sendirinya akan meniru."*[79]

Karena program ini baru uji coba, maka BUMDESA belum membuka untuk masyarakat umum yang ingin membudidayakan. BUMDESA ingin melihat dulu hasil dari uji coba budidaya lele, kalau hasilnya memuaskan kemungkinan di buka untuk masyarakat

[79] Abdul Kholiq, *Wawancara*, Payaman, 09 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum agar masyarakat mempunyai usaha sampingan untuk menambah penghasilan buat kebutuhan hidupnya.

Program ini belum sepenuhnya bisa di terapkan oleh masyarakat desa yang ingin membudidayakan lele, karena BUMDesa belum melakukan persetujuan untuk bisa di kembangkan oleh masyarakat, baru tahap uji coba, ketika nanti program ini berhasil maka, BUMDesa mempersilahkan bagi warga yang ingin mengajukan untuk mengikuti program budidaya ini.

> *"Luwung mas, ono seng ngajak mergawe, timbang suwe nganggur, masio gajie gak akeh tapi iso gawe ngopi karo rokok mas, golek kerjo yo angel mas nek gak nduwe kenalan wong jero mas".*[80]

BUMDesa berharap dengan adanya program ini nanti bisa membantu masyarakat sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan atau masyarakat yang ingin mendapat pekerjaan sampingan.

- **Faktor pendukung dan penghambat BUMDesa dalam menjalankan program usaha.**

Dalam setiap program yang sudah berjalan tidak bisa di pungkiri bahwa faktor pendukung dan penghambat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang di kelola. Di bawah ini adalah faktor-faktor pendukung dalam setiap program yang sudah di jalankan oleh BUMDesa adalah sebagai berikut :

[80] Darmaji, *Wawancara*, Payaman, 20 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Program pengambilan sampah

- Faktor pendukung

Dalam program ini yang menjadi faktor pendukung untuk terlaksananya kegiatan adalah karena sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan kosong untuk di buat tempat pembakaran sampah mereka, sehingga mereka menyuarakan untuk diadakanya suatu program yang di mana dalam program tersebut benar-benar di butuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Sek ono masyarakat seng gak ndwe pluruhan (lahan kosong), jadi program iki pas kanggo masyarakat seng butuh, opo meneh sg di tinggal bojone (suami) nang Malaysia, timbangane buwak dewe nang mbarikan".[81]

- Faktor penghambat

Dalam program ini kendala yang dirasakan oleh BUMDesa sebagai pengelola program adalah belum adanya TPA yang memadai, karena untuk TPA yang di pakai sekarang lokasinya merembet ke lahan milik perhutani, sehingga sampai sekarang masih terjadi polemik antara pemerintah Desa payaman dengan pihak Perhutani.

"Pihak perhutani sudah beberapa kali memberikan teguran kepada pemerintah desa payaman kerena merasa lahan mereka ikut kena imbas dari adanya pendirian TPA di wilayah sejajar tersebut".[82]

[81] Heru Rusdiyanto, Wawancara, Payaman, 28 Juni 2018.
[82] Ali Faizin, *Wawancara*, Payaman, 03 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun menurut Heru Rusdiyanto "BUMDesa juga tidak bisa berbuat banyak karena yang membuang sampah di TPA tersubut tidak hanya petugas sampah dari BUMDesa saja melainkan ada juga masyarakat yang tidak ikut program namun membuang sendiri sampah tersebut dan terkadang mereka seenaknya sendiri ketika membuangnya. Tidak di buang di TPA yang sudah di sediakan malah di buang di lahan kosong pinggir jalan dan ini yang membuat lama-lama sampah menjadi tercecer di lahan milik perhutani. dan ada juga di buang di kali dan ini menyebabkan saluran air yang mengairi sawah warga menjadi tercemar sampah."[83]

2. Program pengelolaan pasar desa

- Faktor pendukung

Dalam program ini yang menjadi fakor pendukung untuk terlaksana dan berjalanya Pasar Desa Payaman adalah adanya kebutuhan masyarakat yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya baik itu sandang, dan pangan, dari pada masyarakat desa membeli kebutuhan di luar desa lebih baik masyarakat desa membeli di Desa sendiri.

"Wong payaman kebutuhane tambah akeh, seng pinter dagang yo akeh, dadi nek gak ono pasar yo eman timbang dodol nang luar deso, mending nang deso dewe, batine iso melbu gae deso dewe."[84]

Masyarakat desa payaman sendiri juga banyak yang menjadi pedagang, sehingga dengan adanya pasar desa sangat diperlukan bagi masyarakat desa sebagai wadah atau tempat bagi para pedagang untuk berjualan barang yang mereka miliki.

[83] Heru Rusdiyanto, *Wawancara*, Payaman, 22 Juni 2018.
[84] Abdul Hakim, Wawancara, Payaman, 09 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini BUMDesa bertugas mengelola pasar desa agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi penataan kios dan berdasarkan barang dagangan yang di jual, sehingga itu bisa membuat lebih tertata rapid an memudahkan para pengunjung dan para pembeli, biar tidak bingung ketika mencari suatu barang karena sudah di tata dengan baik.

- Faktor penghambat

Dalam pengelolaan pasar Desa ini masih banyak yang harus di perbaiki karena pasar masih kurang tertata dengan dengan baik. masih banyak kios para pedagang yang berjualan di pintu masuk, sehingga itu mengakibatkan akses masuk pasar menjadi lebih lama karena para pengunjung pasar harus saling berhimpitan dengan pedagang dan juga semua pengunjung di pintu masuk pasar.

> *"Hak milik sudah banyak yang sudah berubah, beralih tangan, masih belum bisa tertib, pengelompokan masih ada yang belum terkelompok semisal penjual sayur, buah, baju, dll". Aturane angel, wes di atur sek pancet ae, di kandani raleh dodol nang pintu mgo gawe liwatane wong melbu, tapi mek sedino thok, sesuke balik mneh.*[85]

Dari BUMDesa sendiri sudah beberapa kali memberikan teguran dan peringatan kepada pedagang yang tidak tertib tersebut, namun itu hanya berlaku pas ada penertiban dari BUMDesa saja, besoknya kalau tidak ada penertiban ya para pedagang kembali lagi berjualan di pintu pasar.

[85] Abdul Hakim,*Wawancara*, Payaman, 09 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pedagang masih ingin semaunnya sendiri, walaupun sudah di atur dan tidak boleh berdagang di pintu masuk. Mungkin ini tantangan dalam pengelolaan pasar tradisional yang harus bisa segera terselesaikan agar memberikan kenyamana bagi para pengunjung dan juga demi kebaikan pedagang itu sendiri.

3. Program pengelolaan parkir pasar

- Faktor pendukung

Dalam program ini faktor pendukungnya adalah demi keamanan kendaraan bermotor baik sepeda maupun mobil semua pelaku kegiatan di pasar, yaitu pembeli dan pedagang, yang setiap harinya beraktivitas di pasar, agar terhindar dari pencurian kendaraan bermotor, sehingga para pedagang dan pembeli tidak khawatir lagi dengan kendaraannya karena sudah ada pengelola parkirnya.

> *"Luwung melok jogo parkir iso gawe tambahan gawe tuku jajan anak masio gak akeh, timbang nagnggur nang omah turu, ngopi nek gak nang sawah:.*[86]

Dengan adanya program tersebut dapat membantu para pemuda yang belum bekerja untuk di ajak menjadi juru parkir meskipun jumlah juru parkirnya belum banyak, namun setidaknya ada tempat untuk bekerja bagi para pemuda yang belum punya pekerjaan.

[86] Sholik, *Wawancara*, payaman, 07 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Faktor penghambat

Dalam program ini yang menjadi kendala di lapangan adalah tempat parkir yang kurang memadai karena lokasi pasar yang tepat di tengah desa dan pesris di belakang masjid, sehingg parkir pasar desa memakan jalan perlintasan pengguna jalan dan harus rela antri ketika situasi pasar sedang ramai, apalagi ketika hari pasaran yaitu Legi dan Wage.

> *"Parkire supek, dalan buntu, nek wes wayae rame pasaran mas, trus nek sebelah wetan yo panas parkire durong ono eyupane, dadine spedae kepanansen sampek buyar,dalan melbu metu gak ono bedane".*[87]

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya pintu keluar dan pintu masuk parkir yang memisahkan , kendaraan jadi semrawut dan terjadi kemacetan lagi karena kendaraan kadang seenaknya sendiri masuk sampai depan pintu pasar, sedangkan pintu pasar, harusnya steril untuk kendaraan,

4. Program budidaya lele

- Faktor pendukung

Dalam program budidaya lele ini yang menjadi faktor pendukung adalah yang pertama potensi pasar yang sangat besar, salah satunya adalah banyaknya pedagang pecel lele yang ada di dalam desa payaman dan juga di luar desa payaman, dan para

[87] Sholik, *Wawancara*, payaman, 07 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang sangat membutuhkan suplayer ikan lele untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

> *"Potenis pasar yang besar karena banyak yang mencari buat di jadikan menu masakan, perawatan yang mudah, lahan minimalis".*[88]

Yang kedua ikan lele sangat mudah untuk di kembang biakkan, tidak membutuhkan tempat yang luas seperti ikan mujair bandeng dan yang lainnya, dengan modal lahan sempitpun bisa dengan memanfaatkan Terpal plastik ukuran sedang sudah mampu di budidayakan sekitar 500 ekor lele. Memanfatkan gentong plastik juga bisa dengan ukuran besar maupun kecil, cara ini lebih minim tempat lagi namun harga gentong plastic lebih mahal di banding terpal plastic yang lebih ekonomis.

Yang ketiga adalah secara tidak langsung dengan adanya budidaya lele ini membuka lapangan kerja bagi para masyarakat yang berminat untuk melakukan pembudidayaan ikan lele, karena tidak di butuhkan keahlian khusus hanya kemauan dan ketelatenan untuk merawat dari mulai pembibitan hingga panen hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

- **Faktor penghambat**

Dalam program budidaya lele yang sudah berjalan selama (3) tiga bulan ini,

[88] Abdul Kholiq, *Wawancara*, Payaman, 09 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*yang menjadi penghamabat program adalah cuaca yang panas sehingga menyebabkan sumber air mongering dan itu mengurangi kebutuhan air yang digunakan untuk perawatan ikan lele yang membutuhkan stock air yang banyak karena air harus sering di ganti agar air tidak menjadi bau dan mengganggu masyarakat sekitar".*[89]

Faktor lainnya yang menghambat adalah makanan ikan lele atau yang biasa di sebut *pelet* yang mahal, sehingga mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan tidak seimbang antara ongkos produksi dan hasil panen yang di dapat atau diperoleh,

5. Program simpan pinjam

- Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung dalam program ini adalah salah satu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa, sebagai lembaga usaha yang mampu mendukung system permodalan para pelaku ekonomi desa dan bisa mendukung segala jenis usaha masyarakat.

Kebutuhan masyarakat juga menjadi penentu terbentuknya program ini, terutama para pedagang agar mempermudah mengajukan peminjaman yang sudah di sediakan oleh BUMDesa. Tidak lagi mengajukan peminjaman ke bank atau koperasi lain. BUMDesa berharap dengan adanya program usaha simpan pinjam

[89] Abdul Kholiq, *Wawancara*, Payaman, 09 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pemasukan atau laba dari program ini bisa menjadi pemasukan dana untuk pembangunan Desa.

Selanjutnya faktor yang mendukung adalah Proses pencairan pengajuan peminjaman juga lebih mudah dan tidak ribet, syarat peminjaman modal di BUMDesa Mitra Sejahtera adalah dengan mengisi formulir yang berisi perjanjian dan menggunakan foto copy KTP, KK dan membawa surat jaminan tersebut.

> *"Dalam hal jaminan BUMDesa memiliki kriteria sendiri ketika ada yang meminjam yaitu berupa benda bergerak, seperti sepeda motor dan lainya yang memiliki surat lengkap kendaraan atau BPKB tersebut untuk di jadikan jaminan.*[90]

Dengan bunga 1,5 % tiap bulanya, maka ketika ada masyarakat yang meminjam dengan jumlah banyak harus ada pembatasan, karena modal awal dari BUMDesa sendiri sangat terbatas, sehingga harus di bagi rata untuk semua yang sudah menjadi anggota simpan.

- Faktor penghambat

> *Untuk kendala dalam program simpan pinjam adalah dalam aspek permodalan, dengan modal awal hanya 50 juta dari pemerintah desa maka BUMDesa harus melakukan suatu cara agar modal awal bisa mencukupi kebutuhan para anggota yang mengikuti program tersebut.*[91]

Simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDesa ini juga tidak ada simpanan jangka panjang seperti deposito, disini masyarakat

[90] Ali Faizin. *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.
[91] Ali Faizin. *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan simpanan dengan rentan waktu yang sangat pendek karena untuk kebutuhan setiap harinya. Program kebutuhan pemakaman

6. Program kebutuhan pemakaman

- Faktor pendukung

> *"Dalam program ini yang menjadi faktor pendukung kebutuhan pemakaman adalah untuk mempermudah masyarakat yang keluarganya mengalami musibah kematian atau meninggal dunia agar lebih cepat dalam mengurusnya, karena BUMDesa sudah menyediakan batu kapur sebagai penutup jenazah di dalam tanah dan juga menyediakan batu nisan sebagai petanda nama dari keluarga masyarakat yang meninggal dunia".*[92]

Karena faktor tanah di daerah Desa Payaman adalah tanah merah dan mudah lengser dan mudah tumbuhnya rayap maka tidak memakai kayu, karena dulu pernah memakai kayu tapi dalam jangka waktu tertentu tanahnya bisa *ambles,* maka masyarakat berpindah menggunakan batu kapur agar tidak terjadi lagi masalah tersebut.

- Faktor penghambat

> *"Dalam program ini yang menjadi penghambat adalah terkadang terjadi keterlambatan dalam pengiriman batu kapur yang menjadikan proses penguburan menjadi lama, karena*

[92] Husnun Ni'am, *Wawancara*, Payaman, 17 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu datangnya batu kapur yang sudah di pesan oleh BUMDesa".[93]

Hal ini terjadi karena terkadang kepalan Unit lupa mnegecek ketersediaan batu kapur masih banyak atau menipis sehingga pemesanan baru di lakukan ketika ada keluarga korban yang meninggal melakukan laporan bahwa batu kapur yang di butuhkan untuk proses pemakaman kurang. Dengan begitu pihak BUMDesa langsung melakukan pemesanan batu kapur agar segera di kirim.

B. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa

Masyarakat Desa Payaman menjadi suatu kesatuan yang sangat penting ketika BUMDesa mempunyai program usaha yang tujuannya juga untuk masyarakat sendiri. Sehingga keterlibatan masayarakat sangat menentukan untuk berjalannya suatu program usaha yang sudah di kelola oleh BUMDesa "MITRA SEJAHTERA".

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes, pada tahap ini partisipasi masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pelaksanaan program. Masyarakat Desa Payaman mengikuti beberapa program BUMDesa yang memang itu menjadi kebutuhan bagi mereka diantaranya adalah : program simpan pinjam, program pengambilan sampah, program

[93] Husnun Ni'am, *Wawancara*, Payaman, 17 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar desa, program parkir pasar, kebutuhan pemakaman dan program budidaya lele.

- **Sosialisasi**

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDesa.

Dalam hal sosialisasi, BUMDesa Mitra Sejahtera, sudah pernah melaksanakan sosialisasi baik dari lingkungan Desa, mulai dari perangkat Desa dan juga pengurus BUMDesa Mitrs Sejahtera sendiri melalui kegiatan ibu-ibu PKK, Fatayat, Muslimat dan Aisyiyah.

> *"Yo mas, kae suwe pas aku ono kegiatan Fatayat terus ono wong 3 teko tak kiro ono opo tibae trus perkenalan jare teko BUMDesa trus sosialisasi tentang opo iku BUMDesa trus tentang program-programe mas".*[94]

Dengan kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah Desa dan juga pengurus BUMDesa berharap masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwasanya di Desa Payaman sekarang sudah mempunyai badan usaha yang bisa membantu usaha para masyarakat dan juga memperkuat perekonomian Desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

[94] Mas'ula, *Wawancara*, Payaman, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak semua masyarakat mengikuti sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BUMDesa, karena mungkin ruang lingkup sosialisasi yang sudah dilakukan terlalu kecil, sehingga banyak yang belum mengerti dan tahu apa itu BUMDesa dan programnya.

> *"BUMDesa iku opo mas, aku ae lagek ngerti teko sampean mas, aku gak ngerti opo-opo mas, aku yo gak tau melu kegiatan-kegiatan nang Aisyiyah masio aku anggota Aisyiyah".*[95]

BUMDesa dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDesa. Dalam pengambilan keputusan, BUMDesa menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari.

Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDesa. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDesa. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDesa.

Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDesa. Tuntutan itu juga muncul dari masyarakat. Pengelola BUMDesa perlu

[95] Sofiah, *Wawancara*, Payaman, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi. Permasalahan muncul dimana hampir sebagian besar pengelola BUMDesa adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDesa.

BUMDesa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masy arakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDesa dan melakukan pengawasan.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDesa bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).

Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDESA sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMDesa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDESA diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolahan sumberdaya publik. Sedangkan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Dalam hal kebijakan, BUMDesa sudah melakukan sebuah pengelolaan sumberdaya publik melalui program-program yang sudah berjalan, namun dalam penyelenggaraanya belum bisa berjalan sesuai dengan konsep *good governance* salah satunya dalam hal partisipasi masyarakat yang belum semua terlihat akan adanya BUMDesa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menjadi lebih maju dan berkembang apabila peran dari BUMDesa di tanggap rensponsive oleh masyarakat Desa payaman, sehingga akan memunculkan suatu kebijakan yang transparan tanpa ada yang di tutupi ketika masyarakat berperan aktif.

Suatu kebijakan akan menimbulkan suatu dampak. Dampak kebijakan public merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yaitu menggunakan single program before after. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desa Payaman. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDesa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini memang sudah terlihat meskipun baru sebagian masyarakat yang mau ikut sosialisasi dan juga ikut dalam program yang sudah di jalankan oleh BUMDesa MITRA SEJAHTERA, ini sudah termasuk dalam bentuk partisipasi menurut *Sherry R Arnstein* yang di bagi menjadi 8 bagian bentuk partisipasi : Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa payaman sudah menjadi menjalin partnership dengan BUMDesa Mitra Sejahtera, demi tecapainya suatu program yang bisa berjalan dengan baik dan demi kebutuhan masyarakat dan demi kemajuan suatu Desa. masyarakat juga bisa di ajak konsultasi tentang akan dibuatnya sebuah kebijakan baru namun belum tentu masukan tersebut bisa di pakai sebagai keputusan final yang semua itu keputusan akhirnya masih di tangan BUMDesa Mitra Sejahtera Bukan dari kalangan masyarakat, karena belum mempunyai kekuasaan itu.

Table 3.1

Hasil Penelitian Tentang BUMDesa "MITRA SEJAHTERA"

Implementasi dan Peran BUMDesa di Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Simpan Pinjam • melayani dan memberikan pinjaman modal dan juga menerima simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung	• kebutuhan masyarakat • syarat mudah, cukup KK, KTP,dan BPKB sebagai jaminan • bunga kecil, untuk anggota 2%, sedangkan untuk nasabah nonanggota 2,5%.	• Aspek modal yang kurang Sehingga terjadi pembatasan peminjaman jika ada masyarakat yang meminjam modal yang banyak.
2. Pasar Desa • Menata dan menyediakan tempat bagi para pedagang sesuai jenis barang daganganya. • Melakukan penarikan uang (tarik sapon) bagi para pedagang.	• Kebutuhan masyarakat yang semakin besar • Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang.	• Pedagang kurang tertata dalam pengelompokan barang dagangan. • Ada pedagang yang kurang tertib karena masih berdagang di pintu masuk • Kurangnya kesadaran dari pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Parkir Pasar • Menyediakan tempat parkir • Menjaga kendaraan orang yang parkir	• Keamanan kendaraan bermotor. • Mengurangi pangangguran warga meskipun kecil.	• Tempat parkir yang kurang lebar. • Mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar • Belum ada pintu masuk dan pintu keluar.
4. Budidaya Lele • Menciptakan usaha baru bagi masyarakat • Menyediakan pinjaman modal bagi warga yang minat budidaya lele	• Opsi pekerjaan sampingan • Perawatan mudah • Pemasaran mudah • Lahan tidak perlu luas	• Cuaca panas. • Butuh air banyak • Pakan lele mahal
5. Pengambilan Sampah • Menyediakan tong sampah • Mengambil sampah di tong sampah dalam waktu satu minggu dua kali • Memberikan pelayanan pembayaran dan pendaftaran anggota baru.	• Menjaga kebersihan di lingkungan desa • Masyarakat ada yang tidak mempunyai lahan kosong	• Petugas belum punya fasilitas kendaraan pengangkut sampah sendiri. • TPA yang jauh di ujung utara desa • TPA yang menjadi satu dengan tanah milik Perhutani.
6. Kebutuhan Pemakaman • Menyediakan batu nisan dan batu kapur •	• Mempermudah masyarakat tidak perlu cari keluar desa. • Harga lebih terjangkau di bandingkan cari sendiri. • Faktor tanah merah yang mudah lengser (ambruk)	• Kadang terjadi Keterlambatan dalam pengiriman batu kapur dan pengiriman batu nisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang Partisispasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Payaman kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi program BUMDesa Mitra Sejahtera di desa Payaman memang sudah berjalan, namun belum bisa berjalan maksimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman, masih banyak program yang seharusnya bisa dikembangkan, misalnya pertanian, karena hampir rata-rata penduduk payaman berprofesi sebagai petani. BUMDesa sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masayarakat.
2. Faktor pendukung optimalisasi fungsi BUMDesa Mitra Sejahtera dalam setiap program adalah : Pertama, kebutuhan masyarakat pada aspek simpan pinjam modal. Kedua, pengurangi pengangguran. Ketiga, optimalisasi lahan desa untuk menunjang perekonomian warga. Keempat, persyaratan yang ringan. Kelima, bunga pinjaman ringan yaitu 2% untuk anggota, sedangkan 2,5% untuk nasabah non anggota. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, antara lain : Pertama, keterbatasan modal yang dimiliki BUMDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pedagang kurang tertata dalam pengelolaan pasar desa. Ketiga, tempat parkir yang kurang lebar, sehingga mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar. Keempat, minimnya air dan harga pakan lele yang mahal. Kelima, petugas belum punya fasilitas kendaraan pengangkut sampah sendiri. TPA yang jauh di ujung utara desa. TPA yang masih menjadi satu dengan milik pihak perhutani. Keenam, keterlambatan dalam pengiriman batu kapur dan batu nisan. Ketujuh, kurangnya sosialisasi dari BUMDesa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya BUMDesa di Desa Payaman.

3. Keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUMDesa, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan maka saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengurus BUMDesa Mitra Sejahtera di Desa Payaman harus memperbaiki pengelolaan menejemen kelembagaan BUMDesa Mitra Sejahtera untuk mengoptimalkan kinerja unit program usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi pemerintah hendaknya memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Mitra Sejahtera) baik dalam bentuk materil maupun non materil, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMDesa "MITRA SEJAHTERA". Bagi masyarakat hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan dan penggunaan Usaha BUMDesa Mitra Sejahtera.
3. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) yang ada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Rosda Karya, 2006.

Chambers, Robert. *Ideas For Development*. London: Earthscan, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research ll.* Yogjakarta: Andi Offset, 2004.

Hetifa, Sumarto Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Ibrahim, Nana Sujana. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, 2001.

Milles, Mattew B. dan A.Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.

Nogi, Hessel S Tangkilisan. *Manajemen Publik.* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nugroho, Riant. *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manejemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta:PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rosyada, Dede Dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Shodikin, Basrowi. *MetodePenelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insancendikia, 2002.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.

Sugiono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alphabet, 2008.

Suharto, Edi. *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta 2008.

Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*,. Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Wahab, Solichin Abdul. *PengantarAnalisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wijaksono, Sigit. *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*. Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013.

II. Jurnal, Skripsi, Dll :

Anggar Sekar Manikum, *Implementsi program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Yogyakarta : 2010.

Badriyadi. Jurnal. *Pengelolaan Dana Pinjaman di Desa Sungai Raya*. Pontianak. 2012.

Daftar Isian *Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten* Lamongan Tahun 2016.

Fajarsari, Yeni. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*, Skripsi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.

Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia, 2017.

Lamongankab.go.id/instansi/solokuro/payaman/ di akses tanggal 31/05/2018.

Rufaidah ‘aslamiah. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.

Zulkarnain Ridlwan. *Payung Hukum Pembentukan BUMDesa*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 September-Desember, 2013.

III. Wawancara

Abdul Hakim,*Wawancara*, Payaman, 09 Juni 2018.

Ali Faizin. *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Kholiq, *Wawancara*, Payaman, 09 Mei 2018.

Arofah, *Wawancara*, Payaman, 26 Mei 2018.

Chalimin, *Wawancara*, Payaman, 20 Juni 2018.

Darmaji, *Wawancara*, Payaman, 20 Juni 2018.

Heru Rusdiyanto, *Wawancara*, Payaman, 22 Juni 2018.

Husnun Ni'am, *Wawancara*, Payaman, 17 Juni 2018.

Kasiyatun, *Wawancara*, Payaman, 29 Juni 2018.

Maisyaroh, *Wawancara*, Payaman 27 Mei 2018.

Mas'ula, *Wawancara*, Payaman, 29 April 2018.

Sofiah, *Wawancara*, Payaman, 30 April 2018.

Sholik, *Wawancara*, Payaman, 08 Mei 2018.

Shodiqin, *Wawancara*, Payaman, 27 Juni 2018.

Sukimin, *Wawancara*, Payaman, 24 Juni 2018

Tartib, *Wawancara* , Solokuro, 24 Juni 2018.

Zumaro, *Wawancara*, Payaman, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id